



◆ Tiga Tahun Berturut-turut

Kota Pontianak Kembali Raih Predikat WTP

Kota Pontianak kembali menyanggah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan atas laporan keuangan tahun 2013. Predikat penilaian tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) ini diraih tiga kali berturut-turut yakni tahun 2011, 2012 dan 2013.

Borneo Tribune, Pontianak yang ketiga kalinya disandang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Pontianak tahun 2013 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar Didi Budi Satrio kepada Wali Kota Pontianak Sutarmidji di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Senin (2/6). Dari tujuh daerah kabupatendirah predikat WTP dengan paragraf penjelasan yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Landak.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengukuhkan predikat WTP

kan ke kita ada tunggakan sebesar Rp 62 miliar, inilah yang paling berat bagi kita. Sehingga kami harus memvalidasi tentang kebenaran, apakah bisa ditagih atau tidak bisa ditagih," paparnya.

Dijelaskannya, untuk memvalidasi obyek dan subyek pajak yang besar tersebut tidaklah mudah. Kendala itu tak terlepas dari terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki Pemkot akibat banyaknya pegawai yang pensiun dan diberikannya tutorium pegawai.

"Untuk itu kita sudah menyampaikan langkah-langkah yang akan kita lakukan yakni memverifikasi semua obyek dan subyek PBB. Nanti kita minta dampingi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama supaya permasalahan ini bisa tuntas," tuturnya.

Selain persoalan piutang PBB yang menurunkan kualitas WTP yang diraih Kota Pontianak, masalah pelimpahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang belum ada ke-

jelasan juga menjadi salah satu penyebabnya.

"Misalnya rumah susun yang sudah harus dioperasikanalkn tetapi itu masih menjadi aset pemerintah pusat dan belum diserahkan," imbuh Midji.

Kendati demikian, ia optimis tahun depan pihaknya akan berupaya memperoleh WTP dengan kualitas yang jauh lebih baik Kepala Sub-Auditor BPK RI Perwakilan Kalbar Joni Rimdra Putra menjelaskan permasalahan yang umumnya dihadapi pemerintah daerah yakni terkait pengelolaan aset. Karenanya ia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pengelolaan asetnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Karena untuk yang lain-lainnya mungkin dari hasil pemeriksaan kita sudah bisa kita nilai kewajarannya tetapi untuk permasalahan aset ini yang perlu ditingkatkan," ungkapnya.

Menurutnya, dari hasil

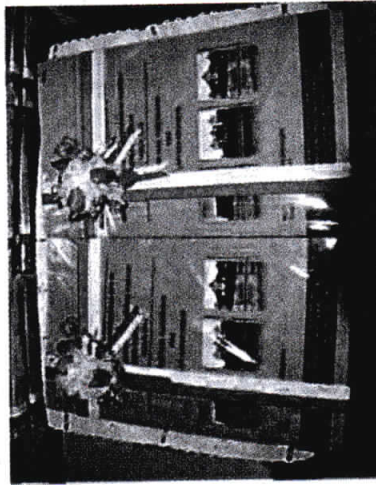
pengujian pihaknya masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukukan beberapa perbaikan supaya tidak ada lagi temuan dalam hal pengelolaan aset. "Apakah pencatatannya harus lebih terrib, pengelolaan aset yang memadai dan lainnya. Kalau itu tidak terkelola dengan baik akibatnya aset yang ada di neraca tersebut itu belum bisa kita yakini kewajarannya," jelas Joni.

Diakui, persoalan aset yang kerap menjadi temuan dalam hasil pemeriksaan diharapkan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah. Pihaknya juga telah memberikan koridor kepada pemerintah daerah terkait apa saja yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti persoalan pengelolaan aset.

"Misalnya aset yang nilainya nol, kita minta tolonglah dibentuk tim penilaian, dari situah kita ketahu nilainya. Atau aset yang tidak diketahui selam ini, tolonglah itu diinventarisasi," pungkaskannya. (St)



Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar Didi Budi Satrio menyerahkan LHP dengan predikat WTP kepada Wali Kota Pontianak Sutarmidji di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Senin (2/6). Foto Ist.



Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat WTP yang diterima Pemkot Pontianak tiga kali berturut-turut. Foto ist